

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012).

Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan 2005). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengansasaran yang dituju. Efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa

dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari sudut pandang tergantung siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu tidak dikatakan efektif.

Menurut Makmur (2010) dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Kelambangan Pengawasan” berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal:

- 1) Ketetapan ketentuan waktu. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan

- 2) Ketetapan perhitungan biaya. Ketetapan dalam perhitungan biaya berarti tepat dalam memanfaatkan biaya terhadap suatu kegiatan, sehingga tidak akan mengalami suatu kekurangan sampai kegiatan tersebut selesai
- 3) Ketetapan dalam menentukan tujuan. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut
- 4) Ketetapan sasaran. Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan tak lepas dari tepat atau tidaknya sasaran yang ditunjukkan suatu organisasi atau individu tersebut.

Menurut Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Dua faktor pencapaian yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongrit.
- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi.
- 3) Adaptasi merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga tinggi (Steers, 1999).

Dari keterangan diatas, ukuran efektivitas yang perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini menggunakan hasil wawancara kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqomah dan teori efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu, pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur efektivitas pemberdayaan ekonomi terhadap peningkatan pendapatan pesantren.

Sugiyono dan Budiani (2007) mengidentifikasikan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan sasaran lebih berorientasi pada jangka pendek dan bersifat operasional. Penetapan sasaran yang tepat, baik secara individu maupun organisasi, sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sebaliknya, jika sasaran kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara untuk menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan program kepada masyarakat umum dan peserta khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013), memberikan informasi adalah langkah awal untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan mempermudah kelanjutan suatu pekerjaan, karena informasi yang diberikan dapat digunakan sebagai pengetahuan oleh penerima.

- 3) Tujuan program, yaitu Sejauh mana hasil program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan harus dilihat sebagai keseluruhan upaya dan proses. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan termasuk kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret. Oleh karena itu, untuk menjamin pencapaian tujuan akhir, diperlukan tahapan yang jelas.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

a. Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan bersal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*power*”. Kemudian dikatakan pemberdayaan karena mempunyai arti perencanaan, proses, dan usaha pengutan atau mengupayakan yang lemah (Yunus dkk., 2017).

Menurut Suharto pemberdayaan merupakan sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam mengendalikan suatu keadaan dan lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan memberikan penekanan bahwa setiap orang mendapatkan ketrempilan, pengetahuan, dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan mereka dan sekitar mereka (Suharto, 2005).

Menurut Prijoyo, S. Onny dan Pranarka A.M.W. (1996), pemberdayaan merupakan proses memperkuat individu atau kelompok masyarakat agar mereka menjadi mandiri. Hal ini dilakukan dengan memberikan dorongan dan motivasi supaya mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dalam hidupnya. Pemberdayaan dapat dipandang sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya dan kekuatan masyarakat yang lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan bertujuan menciptakan perubahan sosial, dimana individu atau kelompok masyarakat menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka baik dari aspek fisik, ekonomi maupun sosial (Yunus dkk., 2017).

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaa itu sendiri adalah menciptakan individu dan masyarakat yang lebih mandiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan berfikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan mereka sendiri. Kemandirian masyarakat ditandai dengan kemampuan berpikir, mengambil keputusan, dan

melakukan tindakan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan yang dihadapi (Widodo, 2015 : 48).

Tujuan pemberdayaan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan menandai bagi warga Negara dengan perekonomian yang berkembang (Widodo, 2015: 203).

Menurut Mardikando (2014) dalam Suhermanto & Fatmawati (2021), terdapat enam tujuan utama dari pemberdayaan, yaitu:

- 1) Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*) meningkatkan citra dan reputasi lembaga melalui inovasi dimasyarakat, serta meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga dapat memperbaiki kerjasama dan mengembangkan jaringan kemitraan dengan pihak terkait.
- 2) Perbaikan Usaha (*Better Business*) produktif melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan yang lebih maju, sehingga memiliki daya saing.
- 3) Perbaikan Pendapatan (*Better Income*) dengan meningkatnya perbaikan bisnis, diharapkan hal ini juga akan meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 4) Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*) adalah lingkungan fisik dan sosial. Karena pada dasarnya kemiskinan dan pendapatan yang rendah merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan.

- 5) Perbaiki Kehidupan (*Better Community*) dengan meningkatnya kondisi, diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup dimasa depan..

c. Pemberdayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip partisipasi, dan prinsip tolong-menolong ditengah-tengah masyarakat. Konsep yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah Saw. Sehingga mempunyai prinsip untuk selalu tolong-menolong (*ta'awun*) bag semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain (hakim & widjaya, 2003). Berikut penjelasan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam perspektif ekonomi Islam:

1) Prinsip Keadilan

Kata “keadilan” dalam Al-Quran disebutkan pada urutan ketiga terbanyak setelah kata Allah dan ‘ilm. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai keadilan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan yang disertai dengan syarat-syarat moral Islam. Jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, maka akan merusak tetapan sosial dan pemberdayaan manusia (Susilo, 2016).

2) Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri diatas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang setiap individu

secara perseorangan, bukan sebagai bagian dari komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Setiap manusia, dengan segala perbedaannya, adalah hamba Allah tanpa perbedaan dalam hak, kedudukan, dan kewajiban. Kebutuhan dasar manusia diatur dengan menyeluruh, dan setiap orang memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kemampuan masing-masing (An-Nabhani, 2009).

Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal, dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dalam perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur status sosial sebagai perbedaan. Sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketakwaannya kepada Allah. Dengan demikian, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya (Al-Hasyimi, 2009).

3) Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan (Hadi, 2009). Partisipasi sebagai kontribusi sukarela dapat menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat serta martabat individu, menciptakan sebuah umpan

balik positif yang memperluas lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan masyarakat.

4) Prinsip Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Islam memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolongmenolong. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas (Rahman, 1994).

Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah memandang pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai salah satu cara agar manusia tersebut dapat terhindar dari kejahiliyahan dan dapat secara mandiri berusaha untuk mengubah nasib kehidupannya.

Kartasmita dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat mengatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Kartasmit, 1995). Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan mendirikan masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan menurut Islam lebih lanjut dikatakan oleh Amrullah Ahmad dalam Pengembangan Masyarakat Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam (Machendrawati dkk, 2001).

Dalam konsep pemberdayaan, fokus utama bukan hanya pada sektor ekonomi seperti peningkatan pendapatan dan investasi. Rasulullah SAW telah memberikan contoh cara mengatasi kemiskinan melalui berdagang dan beternak. Konsep pemberdayaan yang diajarkan Rasulullah SAW berisi ide-ide yang sangat maju, dengan penekanan pada "penghapusan penyebab kemiskinan" daripada "penghapusan kemiskinan" itu sendiri, mirip dengan pendekatan yang hanya memberikan bantuan sementara.

Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan agar memanfaatkan sumber daya yang ada dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karenanya konsepsi pemberdayaan dalam Islam bersifat menyeluruh menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan (Mulyadi, 2006).

3. Perspektif Ekonomi Islam

a. Ekonomi Umum

Dalam bahasa Arab, ekonomi dikenal dengan *al-muamalah al-maddiyyah* dan *al-iqtisad*. *Al-muamalah al-maddiyyah* adalah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, sedangkan *al-iqtisnad* adalah pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia (Idri, 2023). Menurut Schmoller, ekonomi di zaman pemerintahan yang masih berpusat di desa-desa dahulu, tidaklah sama dengan perekonomian setelah adanya pemerintahan kota (Zaky Al Kaaf, 2002:32).

b. Ekonomi Islam

1) Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan *nomos* memiliki arti mengatur. Adapun dalam pandangan islam, ekonomi atau iqtishad berasal dari kata “*qosdun*” yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*). Menurut Muhammad Manan ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Dawam Raharjo dalam bukunya M. Nur Rianto Al Arif memilih ekonomi Islam dalam tiga pemaknaan tersebut.

- a) Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran islam.
- b) Ekonomi Islam adalah suatu sistem yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu.
- c) Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.

Sebagai ilmu, Islam memberikan makna bahwa dalam ekonomi Islam harus selalu dilakukan pengembangan keilmuan agar ditemukan formulasi ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Teori, sistem, aktivitas menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakan syariat dalam bidang ekonomi (Wahid, 2022).

Menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddamah*, bagian V “Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang yang memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu, pemecah soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut, sudut tenaga dan sudut penggunaannya (Zaky Al Kaaf, 2002).

Adapun sudut tenaga terbagi menjadi:

- a) Tenaga untuk mengerjakan barang-barang (objek) untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subjek) dinamakan *ma'asy* (penghidupan).

- b) Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak, dinamakan tamawwul (perusahaan).

Adapun dari jurusan kegunaanya dibagi menjadi:

- a) Kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingan sendiri (rezeki).
- b) Kegunaannya untuk kepentingan orang banyak, sedangkan kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan (Zaky Al Kaaf, 2002).

3. Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Metwally dalam bukunya Eko Suprayitno prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a) Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatnya haruslah bisa dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.
- b) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- c) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam.
- d) Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak

- f) Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggung jawaban di akhirat
- g) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- h) Islam melarang riba dalam segala bentuknya (Suprayitno, 2005).

B. Telaah Pustaka

Penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk mendapatkan acuan, untuk membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian terdahulu dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya dengan penulisan kajian ini sebagai berikut:

1. Putri Indah Arisandi dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani dalam Peningkatan Penghasilan Keluarga ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa Kelompok Wanita Tani mampu berperan untuk meningkatkan penghasilan melalui kegiatan pengolahan hasil pertanian dan ternak hewan. Kelompok Wanita Tani, mampu menjadi wadah untuk meningkatkan penghasilan, wadah untuk bekerja sama didalam usaha-usaha kesejahteraan, dan wadah untuk meningkatkan produktivitas, selain berperan meningkatkan produktivitas dan penghasilan ibu-ibu di Desa Ambarawa Timur tersebut ini juga membawa implikasi yang positif terhadap sosial ekonomi keluarga sesuai dengan ketentuan Islam, dimana berpegang teguh pada nilai-

nilai Illahiyah, melalui jalan halal dan tidak bathil. Baik dalam penelitian ini maupun penelitian penulis mempunyai metode penelitian yang sama, namun berbeda pada objek dan rumusan masalah (Arisandi, 2020).

2. Hasil penelitian Putri Apriyanti dengan judul Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam teknis analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan data yang peneliti peroleh yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama mengadakan penelitian dengan lembaga terkait. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pandangan ekonomi Islam tentang pemberdayaan ekonomi pesantren. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi pesantren belum sepenuhnya berjalan efektif, pemberdayaan ekonomi yang sudah berjalan efektif ada dua yaitu KOPPONTREN dan *La Roiba*. Dikatakan efektif karena KOPPONTREN dan *La Roiba* sudah mencapai target. Persamaan dalam kedua penelitian ini memiliki pendekatan yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan objek penelitian. Pada penelitian terdahulu yang menjadi rumusan masalah adalah efektifitas pemberdayaan ekonomi pesantren dan berlokasi di PP. Terpadu Ushuluddin Lampung Selatan, sedangkan penelitian penulis adalah efektivitas pemberdayaan ekonomi terhadap peningkatan pendapatan pesantren dan berlokasi di PP. Al- Istiqomah Petanahan Kebumen.

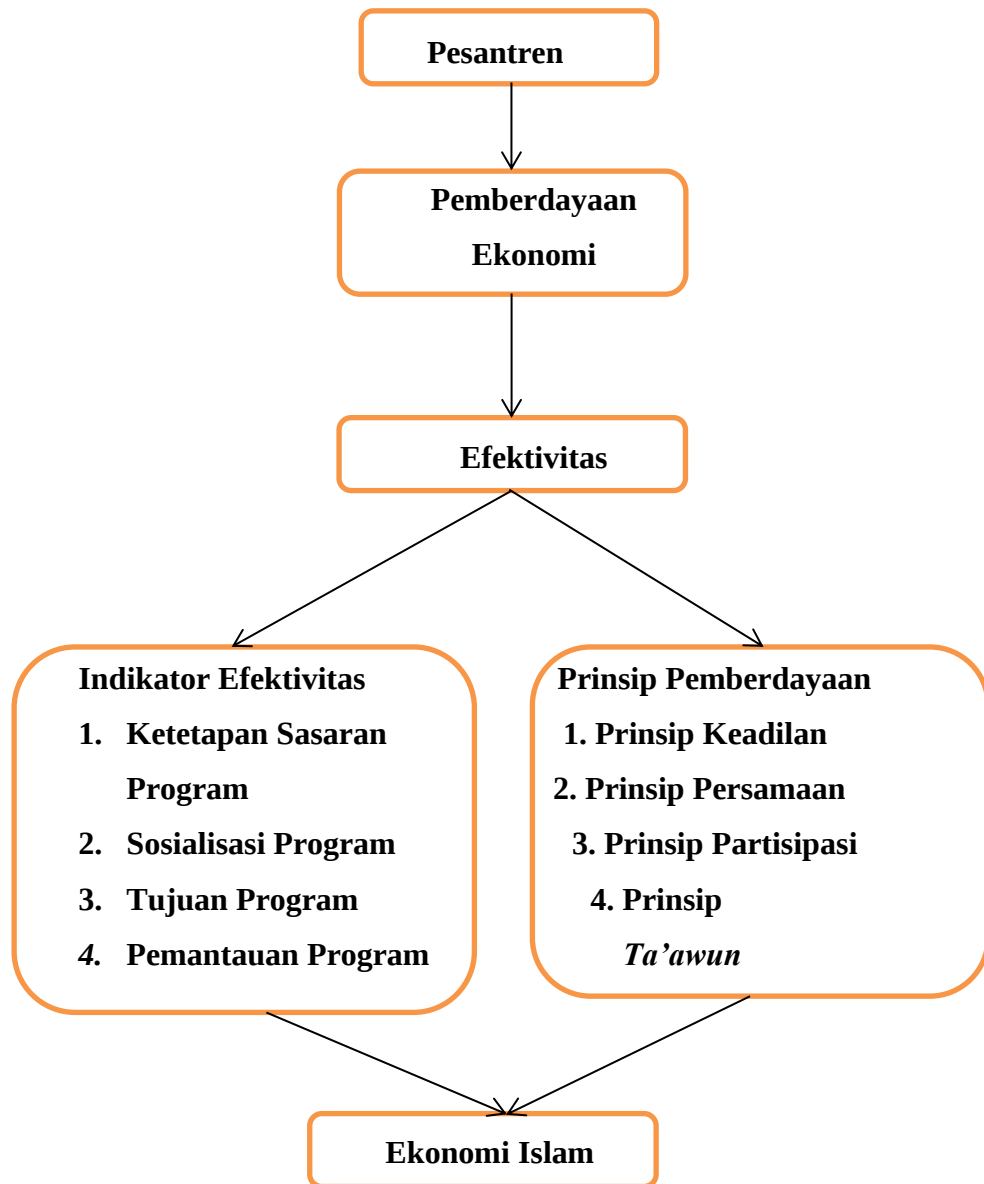
3. Guntur Fernanto, dkk. dalam jurnalnya yang berjudul Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Banten Kota Serang belum terlaksana efektif. Hal ini ditandai berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan, dan aspek kurun waktu pencapaiannya kurang jelas penentuannya, tahapan sosialisai program pada nelayan masih kurang dipahami oleh nelayan, sararan program yang merupakan target kongrit belum sepenuhnya merata dimana masih banyak nelayan yang belum mendapatkan program pemberdayaan. Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas tentang efektivitas dan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang diteliti berbeda, jika penelitian sebelumnya fokus pada pemberdayaan masyarakat nelayan sedangkan pada penelitian ini pemberdayaan ekonomi pesantren. Metode pada pelelitian sebelumnya menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif (Fernando, 2022).
4. Hastuti Mulang, dkk. dalam jurnalnya yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Pengrajin Eceng Gondok. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pengajin eceng gondok ini dilakukan oleh Bumdes. Hasil evaluasi efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pengrajin eceng gondok di Desa Sunggumanai Kecamatan Patallasasang terdapat berberapa kendala dalam proses pemberdayaan ekonomi diantaranya partisipasi masyarakat yang menurun, alat yang kuarang memadai yang dikarenakan

Bumdes kekurangan dana serta tidak ada bantuan dari pihak lain, dan masih berlakunya new normal pasca pandemic Covid-19 yang menjadikan proses pemberdayaan sementara dihentikan. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah membahas tentang efektivitas, membahas pemberdayaan ekonomi, dan menggunakan metode kualitatif. Pemberdaayaan ekonomi yang berbeda, pada penelitian sebelumnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pengrajin eceng gondok, sedangkan dalam penelitian ini pemberdayaan ekonomi pesantren. Tidak hanya membahas pemberdayaan ekonomi, studi kasus dan tempet penelitian juga berbeda (Hastuti, dkk., 2023).

5. Abdul Latib Satar dan Bagus Al-Fariqi dalam jurnalnya Efektivitas Bumdes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Dari penelitian efektivitas Bumdes dalam pemberdyaan ekonomi masyarakat memperoleh hasil yang dapat ditunjukan bahwa Bumdes Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember memberikan suatu pelayanan berupa kegiatan pemebrdayaan masyarakat untuk mengentaskan masyarkat miskin, dan mengatasi masalah-masalah sosial. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah membahas tentang efektivitas dan metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitan tersebut lembaga yang melaksanakan berbeda, studi kasus dan tempat penelitian yang berbeda (Satar & Al-Fariqi, 2021).

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset (Umar, 2003). Skema kerangka berpikir dibawah ini menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kegiatan dan efektivitas pemberdayaan ekonomi pesantren dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Berikut ini adalah model kerangka pemikiran pada Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.



Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran